

**KABUPATEN
SRAGEN**



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN MIRI

TAHUN 2025

**Disusun tahun
2024**



RENCANA KERJA (RENJA) KECAMATAN MIRI
KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2025



DISUSUN TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat rahmat, taufik dan hidayat-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) OPD Kecamatan Miri Tahun 2025 dapat terselesaikan.

Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Miri 2025 merupakan salah satu dokumen perencanaan pembangunan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2025.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang tersebut di atas Rencana Kerja (RENJA) sementara ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Miri tahun 2021-2026.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Miri ini dapat kami susun sebagai bahan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan di Kecamatan Miri pada tahun 2025.

Sragen, 17 Juli 2024

 CAMAT MIRI

ALI RACHMANTO, ST

Pembina

NIP. 19740724 201001 1 011

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... ii

DAFTAR ISI.....iii

DAFTAR TABEL.....iv

BAB I PENDAHULUAN 1

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU 7

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH 46

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 52

BAB V PENUTUP 64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 8

Tabel 2.2 18

Tabel 2.3 32

Tabel 2.4 45

Tabel 4.1 53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1. Pengertian Renja

Renja OPD merupakan dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra OPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Kecamatan Miri merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sragen yang mempunyai tugas mengoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan/atau kelurahan di wilayahnya sesuai Peraturan Bupati Sragen No. 64 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen. Agar pelaksanaan tugas yang telah digariskan berjalan dengan efektif dan terarah, maka penyusunan dan penetapan Renja OPD menjadi mutlak, yaitu sebagai pedoman untuk menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

1.1.2. Proses Penyusunan Renja

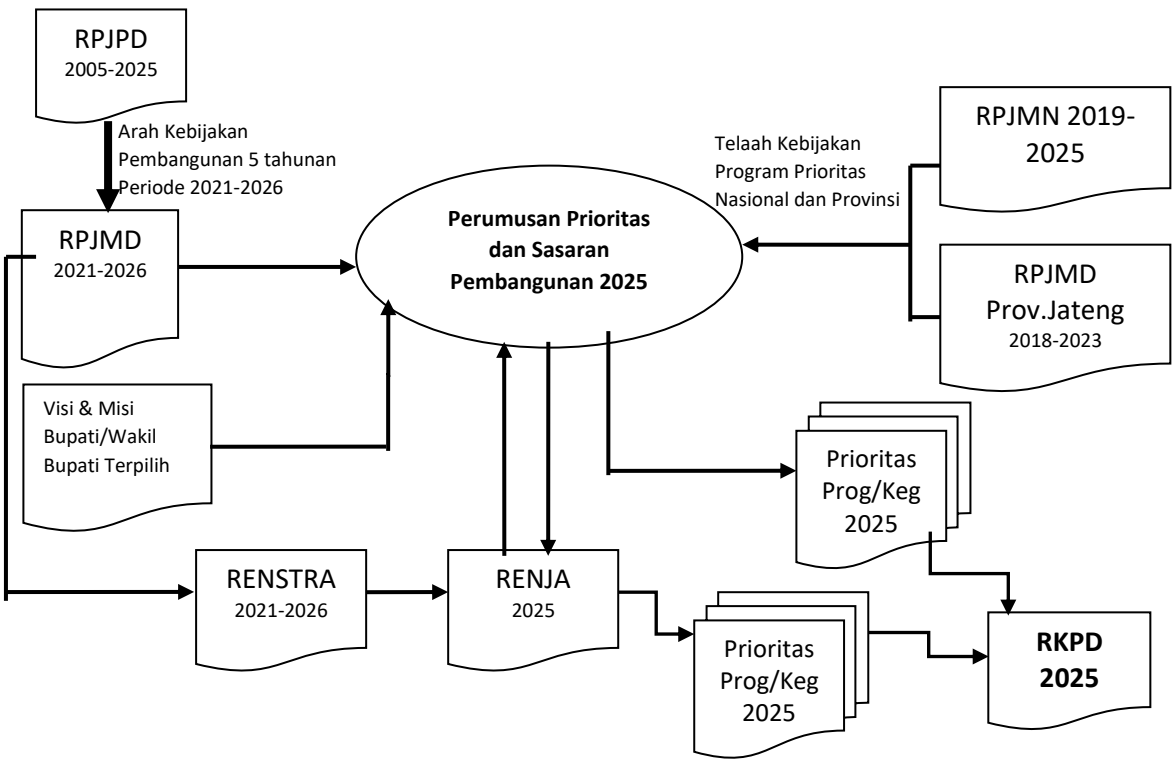
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja OPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja OPD diatur secara teknis dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bagian ketujuh pasal 125 sampai dengan pasal 143 dan penjelasan teknis penyusunan pada Lampiran bagian C. Tata Cara Penyajian Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Dan Dokumen Rencana Perangkat Daerah sub bagian C.5.

Penyajian Dokumen Renja. Rencana Kerja Perangkat Daerah disusun setiap tahun untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan Rancangan renja dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting OPD, evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra OPD. Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja OPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala OPD menetapkan Renja OPD untuk

menjadi pedoman di lingkungan OPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas OPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja OPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja OPD yang disesuaikan dengan Perkada RKPD.
2. Program dan kegiatan dirinci menurut sumber pendanaan yang diusulkan.
3. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/ kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
4. Renja OPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan OPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA OPD setelah memerhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).



Gambar 1.1. Alur Perumusan Prioritas Pembangunan Tahun 2025

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Persiapan Penyusunan Renja
 - a) Pembentukan Tim Penyusun Renja
 - b) Orientasi mengenai Renja
 - c) Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja
 - d) Pengumpulan Data dan Informasi

2. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis, dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja.

3. Tahap Perumusan Rancangan Renja

- a) Pengolahan data dan informasi;
- b) Analisis gambaran pelayanan OPD;
- c) Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja OPD tahun lalu berdasarkan Renstra OPD;
- d) Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD
- e) Telaah terhadap rancangan awal RKPD
- f) Perumusan tujuan dan sasaran;
- g) Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
- h) Perumusan kegiatan prioritas;
- i) Penyajian awal dokumen rancangan Renja OPD;
- j) Penyempurnaan rancangan kerja OPD;
- k) Pembahasan forum OPD; dan
- l) Penyesuaian dokumen rancangan Renja OPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.

4. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja

5. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD

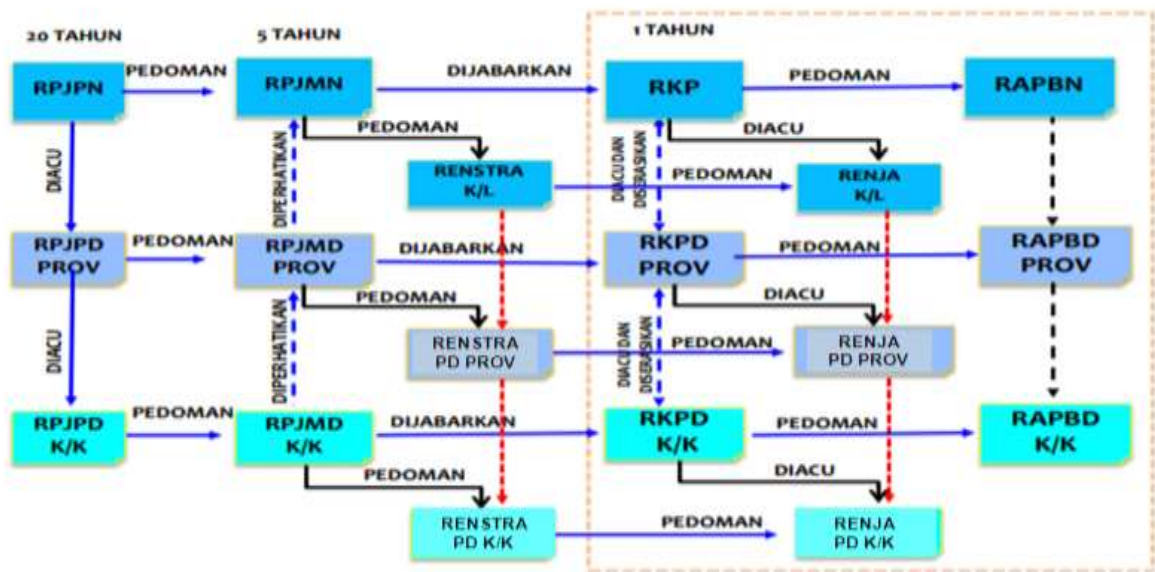
6. Penetapan Renja.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang berwenang 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap Perangkat Daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021 – 2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam RKPD sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja Perangkat Daerah. RKPD menjadi acuan dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan

secara berjenjang mulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten. Selanjutnya Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD menyusun rencana kerja tahunan berupa Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah.

1.1.3. Keterkaitan Antara Renja OPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Kecamatan Miri Tahun 2025 ini merupakan penjabaran dari Renstra Kecamatan Miri Tahun 2021-2026 dan RKPD Kabupaten Sragen Tahun 2025 yang merupakan satu kesatuan dokumen rencana pembangunan yang saling terkait. Oleh karena itu, target capaian sasaran dan indikator yang dicapai dalam dokumen Renja Kecamatan Miri harus selaras/konsisten dengan target capaian sasaran dan indikator yang terdapat dalam RKPD. Lebih lanjut, target capaian program dan kegiatan, serta pagu indikatif yang tertuang dalam dokumen RKPD juga menjadi pedoman dan dituangkan ke dalam daftar prioritas program dan kegiatan tahun 2025.



Gambar 1.2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2005-2025;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031 sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sragen Tahun 2011-2031;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Bupati Sragen Nomor 64 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dan Staf Ahli Bupati Kabupaten Sragen;

22. Peraturan Bupati Sragen Nomor 71 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2021-2026.

1.3. Maksud dan Tujuan

Rencana kerja Kecamatan Miri Tahun 2025 ini disusun dengan maksud untuk menjabarkan program pembangunan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kecamatan Miri 2021-2026. Dokumen ini selanjutnya akan menggambarkan rencana kegiatan berikut sasaran, lokasi dan besaran anggaran yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Adapun Tujuan penyusunan Renja Kecamatan Miri Tahun 2025 adalah:

1. Menetapkan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Kecamatan Miri Kabupaten Sragen dalam melaksanakan tugas dan fungsinya;
2. Mewujudkan program prioritas pembangunan Kecamatan Miri tahun 2025 yang lebih terukur dan lebih optimal;
3. Menjadi dasar penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Tahun 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana Kerja Kecamatan Miri merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana strategis Kecamatan Miri. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan atau program yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LKjIP). LKjIP adalah sebuah dokumen akuntabilitas sebagai bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Terkait dengan hal tersebut, dalam dokumen ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan tahun 2023 dan tahun berjalan 2024. Sejalan dengan berakhirnya tahun anggaran 2023, Renja Kecamatan Miri tahun 2024 telah dilaksanakan. Berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan di tahun anggaran 2023 perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengetahui hasil yang telah dicapai. Hasil evaluasi dari pelaksanaan Renja 2023 dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut :

1. Realisasi program/ kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan: tidak ada. Semua kegiatan yang direncanakan dapat terlaksana dan memenuhi target kinerja.
2. Realisasi program/ kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan adalah : semua kegiatan memenuhi 100 % target kinerja yang direncanakan sebelumnya.
3. Realisasi program/ kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/ keluaran yang direncanakan tidak ada.
4. Faktor yang mendukung tercapainya target kinerja dari semua kegiatan adalah kerja sama dan kolaborasi antar ASN Kecamatan Miri, sehingga semua kegiatan dapat dilaksanakan.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Kecamatan Miri berdampak positif bagi kelancaran administrasi perkantoran pada khususnya dan kepada masyarakat Kecamatan Miri pada umumnya.
6. Kegiatan yang terdapat refocusing anggaran, seperti peringatan HUT RI tetap dapat dilaksanakan dalam kondisi yang minimalis mengikuti pedoman protokol kesehatan

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024

Lembar :

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan			Indikator	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun n-3 (2022)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2022			Target program dan kegiatan	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
							Target Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun n-2 (2023)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun n-1 (2024)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2			3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
				URUSAN								
				BIDANG URUSAN								
7	01	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7	01	01		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	15 orang	15 orang	12 orang	100%	12 org	12 org	100%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	\ "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	\ "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor	\ "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	\ "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan\ "	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%

				Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 dok	264 dok	264 dok	264 dok	100%	264 dok	264 dok	100%
				Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	0 paket	0 paket	100%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	0 unit	22 Unit	0 unit	0 unit	0%	4 unit	26 unit	100%
				Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	54 Unit	3 unit	3 unit	100%	2 unit	59 unit	100%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
				Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	100%	15 unit	15 unit	100%
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	\ "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi\ "	1 unit	1 unit	0 unit	0 unit	0%	0 unit	0 unit	0%

				Pemeliharaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang terpelihara	12 paket	0 paket	0 paket	0 paket	0%	12 paket	12 paket	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Koordinasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	100%	1 dok	1 dok	100%
				Penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan	Prosentase Laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah laporan rapat kegiatan pelayanan publik	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Prosentase Desa yang dibina	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	\ "Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan\ "	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	100%	12 paket	12 paket	100%
				PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	\ "Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan\ "	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	100%	12 dok	12 dok	100%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

				Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	150 org	150 org	150 org	150 org	100%	150 org	150 org	100%
				Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa\ "	150 org	150 org	150 org	150 org	100%	150 org	150 org	100%

				Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional\ "	150 org	150 org	150 org	150 org	100%	150 org	150 org	100%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 desa	0 desa	1 Desa	1 Desa	100%	3 Desa	9 Desa	100%
				Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	\ "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya\ "	10 Desa	10 Desa	10 Desa	10 Desa	100%	10 Desa	10 Desa	100%

KETERANGAN:

n : Tahun perencanaan (2024)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kecamatan Miri sebagai salah satu Perangkat Daerah yang dalam pelaksanaan tugasnya tidak saja berurusan dengan aspek pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan dan administrasi Pemerintah kecamatan saja, melainkan juga merupakan ujung tombak pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan. Oleh karenanya capaian kinerja pelayanannya lebih banyak dianalisis dari sudut pandang tugas pokok dan fungsi Kecamatan dan juga indikator kinerja output yang dihasilkan dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Keterbatasan sumber daya manusia di kantor Kecamatan Miri tentunya harus bisa dioptimalkan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat dengan memperkuat sistem kinerja dan memberdayakan masing-masing personil sesuai tugas pokok dan fungsinya. Selain itu untuk mengatasi keterbatasan tersebut dalam pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat, dibangun pola kebersamaan di mana pelayanan menjadi tanggung jawab semua pegawai tidak sebatas tanggung jawab per seksi. Untuk merealisasikan hal tersebut maka dibangun sistem pelaksanaan tugas yang memungkinkan untuk dilaksanakan kegiatan yang melibatkan lintas seksi. Kualitas pelayanan kepada masyarakat menjadi salah satu indikator keberhasilan perangkat daerah, demikian juga di Kecamatan Miri. Masyarakat menilai kinerja kecamatan dari kualitas pelayanan yang diberikan. Ketika masyarakat dapat terpenuhi kebutuhan akan pelayanan secara baik, maka akan menilai bahwa kinerja perangkat daerah itu baik. Pelayanan di Kecamatan Miri dari sisi administrasi merupakan pelayanan yang paling banyak intensitasnya, berupa pelayanan administrasi kependudukan, legalisasi, surat keterangan, perijinan dan berbagai pelayanan administrasi lainnya.

Dalam rangka mengukur dan meningkatkan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). Langkah pertama yang perlu dilakukan oleh instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian kinerja utama mengandung tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Bupati Sragen nomor 85 Tahun 2021, Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN (Alasan Pemilihan Indikator, Formulasi Pengukuran, Tipe Penghitungan dan Sumber Dana)
1	2	3	4
1.	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan publik di Kecamatan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam memberikan pelayanan publik masyarakat di tingkat kecamatan Formulasi Pengukuran: Survey kepuasan masyarakat Tipe Perhitungan: Non Kumulatif Sumber Data: Kecamatan
2.	Meningkatnya kinerja kecamatan	Predikat LKjIP	Alasan Pemilihan Indikator: Indikator ini dipilih untuk mengukur kinerja kecamatan dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah baik di perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan Formulasi Pengukuran : Hasil Review LKjIP oleh Inspektorat Tipe Perhitungan : Non Kumulatif Sumber Data : Kecamatan

Kecamatan adalah sebagai berikut :

sedangkan rencana target IKU tahun 2025 sebagai berikut :

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024
1	Meningkatnya kualitas dan akses pelayanan public di Kecamatan.	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	87
2	Meningkatnya Kinerja Kecamatan.	Predikat SAKIP	65(B)

Berdasarkan IKU tersebut di atas, maka akan dianalisis kinerja pelayanan Kecamatan Miri yang dapat ditampilkan dalam tabel sebagai berikut :

:Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Kecamatan Miri

NO	Indikator	SPM/standar nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023	Tahun 2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 orang	12 org	12 orang	14 org	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	15 orang	
	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	\ "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 paket	

	\ "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 paket	
	\ "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 paket	
	\ "Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			264 dok	264 dok	264 dok	264 dok	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	264 dok	
	Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0 paket	
	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0 unit	19 unit	5 unit	10 unit	14 unit	5 unit	22 unit	0 unit	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 unit	3 unit	1 unit	5 unit	3 unit	111 unit	54 unit	3 unit	
	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	
	\ "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi \ "			0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	
	Jumlah Paket mebel yang terpelihara			0 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	0 paket	

	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Koordinasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Prosentase Laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah laporan rapat kegiatan pelayanan publik			12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Prosentase Desa yang dibina			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	\ "Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Ketertiban Umum											
	\ "Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan\"			12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	
	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	
	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa\ "			150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	
	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional\ "			150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	
	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa			1 Dok	3 Dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	6 dok	1 Dok	
	\ "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya\"			10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	10 Dok	

N O	Indikator	SPM/standa r nasional	IK K	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			15 orang	15 org	14 orang	14 org	1 Tahun	1 Tahun	1 Tahun	15 orang	

	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	\ "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 paket	
	\ "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 paket	
	\ "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 paket	
	\ "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 paket	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			264 dok	264 dok	264 dok	264 dok	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	264 dok	
	Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			0 paket	0 paket	1 paket	1 paket	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	0 paket	
	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			0 unit	19 unit	5 unit	10 unit	14 unit	5 unit	22 unit	0 unit	

	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 unit	3 unit	1 unit	5 unit	3 unit	111 unit	54 unit	3 unit	
	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	15 unit	

	\ "Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi\ "			0 unit	0 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	0 unit	
	Jumlah Paket mebel yang terpelihara			0 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	0 paket	
	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah Dokumen Koordinasi			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Prosentase Laporan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Jumlah laporan rapat kegiatan pelayanan publik			12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	
	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	1 dok	
	Prosentase Lembaga Desa yang Aktif			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Prosentase Desa yang dibina			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	\ "Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan\ "			12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	12 paket	
	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	\ "Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan\ "			12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	12 dok	
	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia			150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	
\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa\ "			150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	
\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional\ "			150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	150 org	
Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
--	---	--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	--

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Permasalahan yang ada Kecamatan Miri dalam melaksanakan tupoksinya adalah masih lemahnya/belum optimalnya pola Koordinasi fasilitasi, Motivasi lintas sektor di setiap Tupoksi Pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Kesejahteraan Masyarakat, Aset Pertanahan dan keamanan wilayah yang disebabkan:

- a. Etos kerja yang belum terbina secara optimal;
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana pelayanan;
- c. Belum tertib dan lemahnya sistim administrasi perkantoran

Dalam rangka menyelesaikan permasalahan utama Kecamatan sebagaimana diuraikan di atas, terdapat tantangan dan peluang yang saat ini dihadapi oleh Kecamatan Miri sebagai berikut:

a. Faktor Tantangan (*Threat*)

- 1) Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang prima;
- 2) Koordinasi antar instansi dan Pemerintah Desa yang belum maksimal;
- 3) Era keterbukaan informasi menuntut budaya transparansi dan akuntabilitas kinerja birokrasi;
- 4) Semakin terbukanya informasi di era teknologi informasi menuntut sikap aparatur birokrasi untuk lebih responsif terhadap dinamika pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

b. Faktor Peluang (*Opportunity*)

- 1) Komitmen Bupati untuk lebih mendekatkan pelayanan kepada masyarakat melalui pendelegasian sebagian kewenangan Bupati kepada Camat;
- 2) Hubungan dengan *stakeholder* cukup baik;
- 3) Pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan kepada masyarakat;

Berkenaan dengan permasalahan, tantangan dan peluang yang sudah diuraikan di atas, ada beberapa rekomendasi untuk ditindaklanjuti dalam bentuk program dan kegiatan prioritas tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Untuk Perlu meningkatkan akuntabilitas Kecamatan perlu adanya kegiatan perencanaan dan evaluasi kinerja yang lebih baik diluar kegiatan rutin yang sudah dilaksanakan;
- b. Untuk meningkatkan nilai IKM Kecamatan, Perlu adanya kegiatan peningkatan efektivitas pelayanan Kecamatan, diantaranya berupa forum konsultasi publik.

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2025

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)	
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Miri	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	1.884.908.665,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kec. Miri	Persentase ketercapaian pelayanan umum, kepegawaian, dan keuangan Perangkat Daerah	100%	1.884.908.665,00	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Miri	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%	1.584.851.265,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kec. Miri	Cakupan Laporan (CL) administrasi keuangan Perangkat Daerah sesuai aturan	100%	1,584,851,265,00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Miri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	1,584,851,265,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kec. Miri	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	12 orang	1,584,851,265,00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Miri	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100%	47.680.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kec. Miri	Cakupan Ketersediaan (CK) administrasi umum Perangkat Daerah	100%	47,680,000.00	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	5,000,000.00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	5,000,000.00	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	17,000,000.00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	17,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	15,000,000.00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	15,000,000.00	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Miri	\ "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan\ "	12 paket	4,000,000.00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kec. Miri	\ "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan\ "	12 paket	4,000,000.00	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Miri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 dok	1.680.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kec. Miri	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 dok	1,680,000.00	
	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Miri	Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 paket	5.000.000	Penyelenggaraa n rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Kec. Miri	Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 paket	5,000,000.00	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Miri	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	117.621.400,00	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kec. Miri	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	117.621.400,00	

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Miri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	117.621.400,00	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kec. Miri	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	117.621.400,00	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Miri	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100%	84.756.000,00	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Miri	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintahan Daerah	100%	84.756.000,00	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Miri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 paket	27.600.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kec. Miri	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 paket	27.600.000,00	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	3,000,000.00	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	3,000,000.00	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	54,156,000.00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kec. Miri	\ "Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	54,156,000.00	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Miri	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50.000.000.00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kec. Miri	Cakupan pemeliharaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	50,000,000.00	

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Miri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	45,000,000.00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kec. Miri	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	45,000,000.00	
	Pemeliharaan Mebel	Kec. Miri	Jumlah Paket mebel yang terpelihara	12 paket	5,000,000.00	Pemeliharaan Mebel	Kec. Miri	Jumlah Paket mebel yang terpelihara	12 paket	5,000,000.00	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Miri	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100%	24.826.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Kec. Miri	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100%	24.826.000.00	
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Miri	Jumlah Dokumen Koordinasi	100%	24.826.000.00	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Miri	Jumlah Dokumen Koordinasi	100%	24.826.000.00	

	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Miri	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinerg i Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 dok	7.200.000,00	Koordinasi/Sin ergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Kec. Miri	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 dok	7,200,000.00	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. miri	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	1 Dok	17.626.000,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Kec. Miri	Jumlah Laporan Kegiatan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		17.626.000,00	

	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Miri	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100%	23.500.000,00	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMA N DAN KETERTIBAN UMUM	Kec. Miri	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100%	23,500,000.00	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Miri	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	23,500,000.00	Koordinasi Upaya Penyelenggara an Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kec. Miri	Cakupan Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	23,500,000.00	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Miri	\ "Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan\ "	12 dok	23,500,000.00	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kec. Miri	\ "Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan\ "	12 dok	23,500,000.00	

	PROGRAM PENYELENGGARA AN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Kec. Miri	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasika n dengan baik	100%	117.750.000,00	PROGRAM PENYELENGGA RAAN URUSAN PEMERINTAH AN UMUM	Kec. Miri	Prosentase penyelenggaraan Pemerintahan Umum yang terkoordinasikan dengan baik	100%	117.750.000,00	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Miri	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	100%	117.750.000,00	Penyelenggara an Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Kec. Miri	Prosentase Cakupan Pembinaan Pemerintahan Umum	100%	117.750.000,00	
	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kec. Miri		150 org	100,000,000.00		Kec. Miri		150 org	100,000,000.00	

	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Miri	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa\ "	150 org	12,000,000.00	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kec. Miri	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa\ "	150 org	12,000,000.00	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Miri	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional\ "	150 org	5,750,000.00	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kec. Miri	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional\ "	150 org	5,750,000.00	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Kec. Miri	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100%	21.322.091,00	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH AN DESA	Kec. Miri	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100%	21.322.091,00	

	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Miri	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100%	21.322.091,00	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Kec. Miri	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100%	21.322.091,00	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Miri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dok	10,000,000.00	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kec. Miri	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dok	10,000,000.00	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kec. Miri	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	6 Dok	7.322.091,00	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah dokumen Pelaksanaan Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		7.322.091,00	

	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Miri	\ "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya\ "	10 Dok	4,000,000.00	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	Kec. Miri	\ "Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya\ "	10 Dok	4,000,000.00	
JUMLAH					2.072.306.756,00					2.072.306.756,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musrenbang ini merupakan salah satu tahapan perencanaan pembangunan yang harus dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Sragen dan merupakan forum strategis yang melibatkan semua pelaku pembangunan di Kabupaten Sragen baik itu dari unsur pemerintah maupun unsur swasta dan tokoh masyarakat yang berkepentingan dengan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Sragen. Kegiatan dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Musrenbang Kabupaten dan diteruskan pada tingkat Provinsi dan Nasional.

Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Sragen Tahun 2025 secara berjenjang mulai tingkat Desa, Kecamatan hingga tingkat Kabupaten termasuk forum Perangkat Daerah menggunakan Sistem Aplikasi Musrenbang dan pengajuan Usulan program dari Desa lewat SIPD-RI Berbasis Online. Usulan program dan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Hasil usulan program dan kegiatan masyarakat dalam Musrenbang Kecamatan Miri Tahun 2025 ditetapkan 10 usulan prioritas hasil dari penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan usulan rencana kegiatan pembangunan 10 desa, yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah di Wilayah kecamatan akan disampaikan dalam forum Perangkat Daerah. Forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk Menyelaraskan program dan kegiatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di kecamatan dan Menyelaraskan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan untuk sinergi pelaksanaan prioritas pembangunan daerah. Sedangkan fungsi Kecamatan untuk melaksanakan Validasi setiap usulan prioritas yang masuk untuk ditindaklanjuti di OPD Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

Tabel 2.4
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Miri

No	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
1	Pembangunan Jembatan	Dk. Muneng dan dk. Bagor	Penggerak Perekembangan perekonomian	P: 170 m L: 4 m	Belum adanya jembatan penghubung dk.muneng ds. bagor
2	Talud jalan desa	Ds. brojol dk Rejosari- dk.Karanganyar	Salah satu factor pendukung pertumbuhan ekonomi	P:500m L: 30cm T: 1 m	Bahu jalan mudah longsor
3	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	Desa Doyong	Mengoptimalkan rasa kepemudaan terhadap lingkungan	20.000.000	Kurang pedulinya pemuda terhadap Lingkungan
4	Talud jalan desa	Jl. Mangga dk Pelem Rt 10 Ds. Geneng Kec. Miri s/d Wonorejo, Kec. kalijambe	Penggerak Perekonomian	P: 5000m L: 3m	Bahu jalan mudah longsor
5	Pengaspalan jalan desa	Dk. Prinapus-dk. gunungsono, gilirejo,Kec. Miri	Penggerak Perekonomian	P; 500m L: 30m T: 1m	Jalan rusak
6	Rekonstruksin jalan	Pelem binatur- Margomulyo, Gilirejo baru,Kec. Miri	Penggerak Perekonomian	80.000.000	Jalan Rusak
7	Talud jalan desa	Dk. Losari RT 007,Girimargo,Kec. Miri	Penggerak Perekonomian	P:5000m L:30 cm T:1m	Bahu jalan mudah longsor
8	Pengasp[alan jalan desa	Cengklik Rt 10,Watubucu Rt20,desa.Jeruk,Miri	Penggerak Perekonomian	P: 4000m L: 4 m T: 3,5 cm	Jalan rusak Akses ke Kecamatan
9	Lapangan desa	dk. Soko RT 10,ds. Soko,Kec. Miri	Pusat Kegiatan dan Komunitas di ds.Soko	80.000000	Pusat Kegiatan dan Komunitas di ds.Soko
10	Pembangunan jembatan	Dk. tegalrejo,Sunggingan, Kec. Miri	Penggerak Perekonomian	150.000.000	Jembatan Rusak

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Guna mendukung tercapainya sasaran pembangunan nasional tahun 2025, dibutuhkan peran serta daerah dalam percepatan pertumbuhan ekonomi dan pengurangan pengangguran dan kemiskinan yang dapat dijabarkan ke dalam prioritas program daerah. Keselarasan program-program pembangunan di daerah dengan program prioritas nasional/provinsi perlu terus ditingkatkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional/provinsi. Fungsi Kecamatan Miri sebagai pusat pelayanan

masyarakat merupakan ujung tombak untuk berhadapan dan memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat serta meningkatkan kualitas pelayanan maka berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan, maka dibuat kebijakan berupa PATEN. Program PATEN merupakan wujud dari pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Kecamatan juga mendukung program pemerintah tentang kesetaraan gender berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Untuk Pemerintah Daerah, melalui program Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan. Perencanaan Responsif Gender (PRG) dilakukan untuk menjamin keadilan dan kesetaraan bagi perempuan dan laki-laki dalam hal akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan dengan melakukan analisis gender. Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) ke depan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Pemerintahan Kecamatan merupakan bagian Integral dari Pemerintahan Kabupaten Sragen, oleh karena itu sistem perencanaan program kegiatan Kecamatan juga merupakan bagian tidak terpisahkan dari program kegiatan Pemerintahan Kabupaten Sragen. Sebagaimana

diketahui Visi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Tahun 2023-2026 adalah “ Menuju Kabupaten Sragen Mandiri, sejahtera dan berbudaya berlandaskan semangat gotong royong” Secara terperinci rumusan visi tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut: “Terwujudnya Kabupaten Sragen yang mandiri ,sejahtera dan berbudaya dengan semangat gotong royong Guna Mencapai Kemajuan Pembangunan yang membentuk karakter masyarakat yang memiliki harkat dan kepercayaan diri yang tinggi untuk mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik.” dengan 5 Misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
2. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, efektif, terpercaya dan bersinergi dengan pelayanan public berbasis teknologi.
3. Peningkatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan ketahanan pangan.
4. Penanganan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja.
5. Pembangunan yang merata dan berkeadilan serta berwawasan lingkungan dengan semangat gotong – royong.

Kecamatan sendiri sebagai unsur penunjang mendapatkan misi nomor 1 yaitu “ Mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang efektif, aspiratif dan transparan”, dengan tujuan sebagai berikut :

- 1) Meningkatkan kinerja Aparat Kecamatan.
- 2) Kualitas pelayanan publik meningkat

Secara spesifik tujuan dan sasaran Rencana Kerja Kecamatan Miri adalah sebagai berikut:

a. Tujuan :

1. Meningkatkan mutu pelayanan publik di kecamatan.

Sasaran : Meningkatkan kualitas dan akses pelayanan publik di kecamatan.

Indikator : Nilai indeks kepuasan masyarakat

2. Meningkatkan kinerja kecamatan

Sasaran : Meningkatnya kinerja kecamatan

Indikator : Predikat SAKIP

3.3. Program dan Kegiatan

Faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Kecamatan Miri Tahun 2025 adalah untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sragen tahun 2021 –

2026, yang telah dirumuskan dalam tema pembangunan daerah didalam RKPDKabupaten Sragen Tahun 2025, yaitu **Akselerasi dan Pemantapan Peningkatan Kualitas Infrastruktur wilayah dan lingkungan hidup**”, dengan prioritas pembangunan sebagai berikut:

1. Pemantapan kualitas infrastruktur berwawasan lingkungan hidup
2. Percepatan penanganan kemiskinan dan pengangguran
3. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan investasi,
4. Peningkatan kualitas pelayanan dasar masyarakat;
5. Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah.

Selanjutnya prioritas pembangunan tersebut dirumuskan dalam Rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yang dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Wajib Pelayanan Dasar, 17 (delapan belas) Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, 6 (enam) Urusan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 4 (empat) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawas, 1 (satu) Unsur Kewilayahan dan 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan, untuk mendukung prioritas pembangunan daerah ke- 5, yaitu: **Pemantapan tata kelola pemerintahan dan kondusifitas wilayah serta pemantapan kapasitas fiskal daerah**, Kecamatan Miri masuk kategori Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan dan Unsur Kewilayahan, yang mencakup 06 program 10 kegiatan dan 23 sub kegiatan sesuai dengan Permendagri nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagai berikut:

Kode	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)
07.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1.884.908.665
07.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.584.851.265
07.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.584.851.265
07.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	47.680.000

07.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5.000.000
07.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	17.000.000
07.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000
07.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000
07.01.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.680.000
07.01.01.2.07	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	5.000.000
07.01.01.2.07.05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	117.621.400
07.01.01.2.08	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	117.621.400
07.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84.756.000
07.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	27.600.000
07.01.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	3.000.000
07.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	54.156.000
07.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50.000.000
07.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	45.000.000
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000
07.01.01.2.09.09	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	24.826.000
07.01.02	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	24.826.000

07.01.02.2.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	7.200.000
	Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan	17.626.000,00
07.01.03.2.01	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	23.500.000
<i>7.01.03.2.01.03</i>	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	23.500.000
07.01.04	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	23.500.000
07.01.04.2.01	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	117.750.000,00
<i>7.01.04.2.01.01</i>	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	117.750.000,00
07.01.05	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi)	100.000.000,00
07.01.05.2.01	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	12.000.000
<i>7.01.05.2.01.02</i>	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	5.750.000
<i>7.01.05.2.01.03</i>	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	21.322.091,00

07.01.06	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	21.322.091
7.01.06.2.01	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	10.000.000
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	7.322.091
<i>JUMLAH</i>		2.072.306.756

Berdasarkan tabel di atas, secara umum program dan kegiatan yang ditetapkan dalam Renja tahun 2025 sudah sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025, meskipun ada beberapa penyesuaian terkait sub kegiatan dan jumlah pagu anggaran. Beberapa penyesuaian tersebut adalah sebagai berikut:

1. Terdapat sub kegiatan yang ditambahkan karena pentingnya Sub Kegiatan tersebut yaitu Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD. Pemeliharaan Mebel dan Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi).
- 2 Terdapat 23 sub kegiatan yang berubah jumlah anggarannya (baik bertambah maupun berkurang) menyesuaikan kondisi terkini terkait SSH, pergeseran antar sub kegiatan maupun aspirasi anggota DPRD KabupatenSragen.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Dari uraian permasalahan yang sudah disebutkan di bab II di atas, masalah utama kecamatan Miri yaitu :

1. Masih rendahnya predikat SAKIP di Kecamatan, dipengaruhi oleh faktor – faktor sebagai berikut:
 - a. Kurang optimalnya Sinkronisasi administrasi Keuangan.
 - b. Kurangnya wawasan kebangsaan masyarakat maka disusun rencana kerja dan pendanaan program penyelenggaraan urusan pemerintahan umum.
2. Masih rendahnya tingkat akuntabilitas di Kecamatan yang disebabkan karena belum optimalnya penyelenggaraan administrasi perkantoran, maka disusun rencana kerja dan pendanaan program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Pendanaan Perangkat Daerah dialokasikan dari APBD bagian Dana Alokasi Umum , sedangkan Rencana yang akan dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan tersebut diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan Tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja;
- 2) Meningkatkan koordinasi dalam penyelenggaraan program-program yang masih belum optimal bersama instansi terkait;
- 3) Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan.

Uraian lebih rinci mengenai rencana kerja dan pendanaan di Kecamatan Miri dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini :

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024

Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

Kabupaten Sragen

Nama Perangkat Daerah : Kecamatan Miri

No. Urut						Urusan/ Program/ Kegiatan	Prioritas Daerah	Sasaran Perangkat Daerah	Lok asi	Indikator kinerja						Pagu Indikatif	Prakiraan Maju	Jenis Kegia tan	Penan ggung jawab
										Hasil Program		Keluaran Kegiatan		Hasil Kegiatan					
										Tolok Ukur	Targ et	Tolok Ukur	Target	Tolok Ukur	Targ et				
1						2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
						Urusan .pemerintahan													
						Bidang Urusan umum													
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHA N DAERAH KABUPATEN/K OTA			Kec. Miri	Persentase ketercapai an pelayanan umum, kepegawai an, dan keuangan Perangkat Daerah	100 %		100%		100 %	1.884.908.665	1.884.908.665	Oper sional	

						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				Kec. Miri		12 paket	\ "Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	tersedianya Peralatan dan Perlengkap an Kantor	12 paket	17.000.000	17.000.000	Oper sional	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor				Kec. Miri		12 paket	\ "Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan\ "	12 paket	terpenuhiny a Bahan Logistik Kantor	12 paket	15.000.000	15.000.000	Oper sional	
						Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				Kec. Miri		12 paket	\ "Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan\ "	12 paket	tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	12 paket	4.000.000	4.000.000	Oper sional	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				Kec. Miri		264 dok	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	264 dok	tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	264 dok	1.680.000	1.680.000	Oper sional	
						Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD				Kec. Miri		1 paket	Jumlah Paket Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1 paket	lancarnya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 paket	5.000.000	5.000.000	Oper sional	

						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Kec. Miri		100 %	Cakupan pengadaan barang milik daerah (CPBMD) penunjang urusan pemerintaha n daerah	100%	terpenuhi ya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerinta h Daerah	100 %	117.621.400	117.621.400	Modal	
						Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			Kec. Miri		1 unit	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1 unit	tersedianya sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 unit	117.621.400	117.621.400	Modal	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Kec. Miri		100 %	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang (CPJP) Urusan Pemerintaha n Daerah	100%	tersediany a Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah	100 %	84.756.000	84.756.000	Operasional	
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Kec. Miri		12 paket	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 paket	lancarnya pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 paket	27.600.000	27.600.000	Operasional	

					Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Kec. Miri		15 unit	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	15 unit	tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	15 unit	45.000.000	45.000.00045.000.00045.000.000	Operasional	
					Pemeliharaan Mebel			Kec. Miri		12 paket	Jumlah Paket mebel yang terpelihara	12 paket	terpeliharaan ya Mebel	12 paket	5.000.000	5.000.000	Operasional	
					PROGRAM PENYELENGGAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK			Kec. Miri	Persentase Pelayanan yang sesuai standar pelayanan	100 %		100%		100 %	24.826.000	24.826.000	Operasional	
					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			Kec. Miri		100 %	Jumlah Dokumen Koordinasi	100%	lancarnya Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	100 %	24.826.000	24.826.000	Operasional	

					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			Kec. Miri		1 dok	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 dok	lancarnya Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	1 dok	7.200.000	7.200.000	Operasional	
					Peningkatan Efektifitas pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di wilayah Kecamatan			Kec. Miri		12 dok	Jumlah laporan rapat kegiatan pelayanan publik	12 dok	Jumlah laporan rapat kegiatan pelayanan publik	12 dok	17.626.000,00	17.626.000,00	Operasional	
					PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM			Kec. Miri	Prosentase Penanganan Laporan Kejadian	100 %		100%		100 %	23.500.000	23.396.000	Operasional	

[illegible]

					Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional			Kec. Miri		150 org	\ "Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku , Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional\ "	150 org	lancarnya Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	150 org	5.750.000	5.750.000	Operasional	
					PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA			Kec. Miri	Prosentase desa yang menyelesaikan RKPDesa dan APB-Desa tepat waktu	100 %		100%		100 %	21.322.091	21.322.091	Operasional	

					Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa			Kec. Miri		100 %	Prosentase Desa yang memperoleh fasilitasi, rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan	100%	lancarnya Fasilitasi, Rekomend asi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasa n Pemerinta han Desa	100 %	21.322.091	21.322.091	Operasional	
					Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa			Kec. Miri		6 dok	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6 dok	lancarnya Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintah an Desa	6 dok	10.000.000	10.000.000	Operasional	
					Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa			Kec. Miri		10 Dok	\Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa \"	10 Dok	terKoordina sinya Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10 Dok	7.322.091	7.322.091	Operasional	
JUMLAH															2.072.306.756	2.072.306.756		

BAB V

PENUTUP

Kecamatan Miri sebagai salah satu Perangkat Daerah di Kabupaten Sragen berkewajiban untuk mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Sragen sebagaimana ditetapkan dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sragen tahun 2021-2026. Untuk mendukung hal tersebut, Kecamatan Miri telah menyusun Rencana Kerja Kecamatan Miri tahun 2025 yang memuat tujuan dan sasaran strategis Kecamatan selama 1 (satu) tahun. pedoman dalam melaksanakan program , kegiatan dan Sub Kegiatan.

Renja Kecamatan Miri tahun 2025 ini merupakan komitmen dari pimpinan dan seluruh staf Kecamatan Miri dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra Kecamatan Miri 2021-2026. Dengan disusunnya Renja 2025 ini, Kecamatan Miri telah mempersiapkan diri untuk melaksanakan kegiatan dengan terencana, terkoordinasi dan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai pada Tahun 2025, dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja Kecamatan Miri Tahun 2025 ini disusun dengan berpedoman pada Renstra Kecamatan 2021-2026 tahun kedua dan diselaraskan dengan RKPD Kabupaten Sragen tahun 2025. Renja 2025 ini akan menjadi dasar dalam menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan dilanjutkan dengan Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun 2025. Disamping itu, jika dalam perjalanan waktu terdapat prioritas kegiatan tertentu yang harus dilaksanakan, keterbatasan dana dan/atau adanya kebijakan Kepala Daerah maupun Kebijakan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah pusat, maka kegiatan yang sudah direncanakan dalam dokumen Renja 2025 ini dapat dilakukan penyesuaian (revisi) sesuai kebutuhan.

Miri, 17 Juli 2025

 Camat Miri

ALI RACHMANTO, ST.
Pembina
NIP:19740724 201001 1 011

